e-ISSN : 2722-4295
Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/fbc
Email : redaksikais@umj.ac.id

KAIS
Kajian Ilmu Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta

# KEBANGKITAN POLITIK ISLAM PASCA ORDE BARU, 1999-2001

Abdul Rahman[1], Mubarak Dahlan[2], Dimas Ario Sumilih[3]

[123]) Program Studi Pendidikan Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar

Email: abdul.rahman8304@unm.ac.id

**Abstrak**

Krisis ekonomi yang melanda Republik Indonesia sekitar tahun 1997 menjadi faktor utama terjadinya gerakan dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan mahasiswa dan kaum intelektual lainnya. Gerakan ini bertujuan mewujudkan suksesi kepemimpinan nasional, dalam arti memberhentikan Soeharto dari tampuk kekuasaan. Muncul pula kekhawatiran kalau Soeharto tidak mampu menuntaskan krisis yang melanda Republik Indonesia. Akhirnya gerakan itu telah mendorong Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Setelah jatuhnya Soeharto, keran demokrasi terbuka setelah sekian lama tertutup. Era keterbukaan tersebut ditandai pula dengan kebebasan bagi setiap warga negara untuk melakukan aktifitas politik termasuk kalangan umat Islam. Tulisan ini merupakan kajian pustaka dengan cara menelusuri, merujuk, dan menganalisis sumber-sumber literatur berupa buku dan jurnal.

Kata Kunci: Politik Islam, Demokrasi, Reformasi.

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, baik dalam hal aqidah, syariah, ibadah dan muamalah (Majid, 2008: 65). Hal ini senada dengan pernyataan dari Gibb bahwa Islam adalah sebuah peradaban paripurna (Mutawali, 2015: 110-120). Dalam perjalanan sejarah, Islam tampil sebagai legitimasi politik rakyat yang sangat kuat. Islam memiliki peran aktual maupun simbolik sebagai perlawanan rakyat dalam melakukan pemberdayaan politik untuk mencapai kemaslahatan bersama (Abdurrahman, 2005: 17). Dengan demikian dalam percaturan politik di Indonesia, keberadaan Islam dan negara sangat terpau erat. Islam sebagai agama yang integral dan komprehensif telah mengatur kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Tidak ada aspek dari aktivitas keseharian umat Islam, termasuk dalam pengelolaan negara, dapat dipisahkan dari agama (Arif, 2018: 37).Dalam kepustakaan Islam telah lama dikenal Fiqh politik (*Fiqhi Siyasah*), yang mendasari pandangannya bahwa Syari'at Islam di samping mengatur tentang

ketuhanan, hubungan antara manusia dengan Tuhannya (masalah-masalah ibadah) serta akhlak, tetapi juga mencakup hubungan individu dengan negara atau pemerintah (Noer 2019). Politik menurut perspektif syari'at ialah yang menjadikan syari'at sebagai landasan, mengaplikasikannya di muka bumi, untuk kemaslahatan manusia, sekaligus sebagai tujuan dan sasarannya. Islam adalah aqidah dan syari'ah, agama dan daulah, kebenaran dan kekuatan, ibadah dan kepemimpinan, mushaf dan perang. Dalam kepustakaan modern bidang-bidang ini adalah termasuk dalam bidang kenegaraan dan kebijakan publik, dan hukumnya adalah masuk dalam bidang hukum publik, yaitu hukum tata negara, administrasi negara, hukum pidana dan hukum acara (Zoelva, 2012: 99-112).

Salah satu hal mengenai Islam yang tidak mungkin diingkari ialah pertumbuhan dan perkembangan agama itu bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan sistem politik yang diilhaminya. Sejak Muhammad SAW melakukan hijrah dari Makkah ke Yastrib, hingga saat ini Islam menampilkan gaya politiknya dalam pengelolaan Negara seperti yang terjadi pada Republik Islam Iran dan Kerajaan Saudi Arabia (Madjid, 2007: 202). Untuk konteks Indonesia, meskipun negara ini tidak memproklamasikan dirinya sebagai Negara Islam, namun karena mayoritas penduduknya beragama Islam maka banyak kebijakan negara ataupun peraturan dan hukum yang bersumber dari ajaran Agama Islam. Kebijakan ataupun peraturan yang dimaksud antara lain Undang-Undang Peradilan Agama (UU no:7 tahun 1989), Kompilasi Hukum Islam (Inpres No : 1 Tahun 1991), sertifikasi dan labelisasi halal, dan juga berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia tahun 1991 (Tebba, 2001: xiii).

Politik merupakan cara menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal merugikan bagi kepentingan manusia (Nursyamsu, 2017: 167-182). Politik Islam ialah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam. Karena itu, mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam, juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan perlambang Islam, dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, serta wacana politik (Syarif, 2013: 73-90). Politik Islam secara substansial merupakan penghadapan Islam dengan kekuasan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam (Karim & Mamat, 2013: 127-143).

Dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia, kalangan Islam telah memberikan sumbangan besar dalam proses pendirian negara ini. Islam telah memberikan warna yang kuat dalam proses membangun kesadaran dan integrasi nasional, baik dalam bentuk perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di seantero Nusantara maupun perjuangan secara diplomatis yang dilakukan oleh organisasi yang berlandaskan Islam misalnya saja Sarikat Islam, Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (Farouk, 1993: 25). Hal ini berarti bahwa Islam merupakan faktor utama dalam menumbuhkan semangat nasionalisme di Indonesia. Meskipun dalam perjalanannya nasionalisme di Indonesia dalam pandangan (Mas'oed 1998: 195) terkonstruksi dari dua sisi yakni nasionalisme dari sisi gagasan dan nasionalisme dari sisi kebijakan atau praktek. Pada sisi gagasan nasionalisme dipadang sebagai *state of mind* atau sebagai perwujudan kesadaran nasional dari para individu selaku anak bangsa. Sementara jika nasionalisme dipahami sebagai bentuk strategi atau kebijakan, maka nasionalisme dipahami sebagai bentuk strategi politik atau fenomena politik dalam upaya melepaskan diri dari tekanan bangsa asing demi terwujudnya sebuah negara berikut warganya yang merdeka dan berdaulat menuju negara yang makmur dan sejahtera.

Masalah hubungan antara Islam dan politik kenegaraan di Indonesia merupakan persoalan menarik untuk dibahas. Faktor ini tentu bukan hanya dengan alasan bahwa negara Indonesia merupakan negara mayoritas warga negaranya beragama Islam, akan tetapi karena kompleksnya permasalahan yang muncul. Hubungan antara agama dan negara di Indonesia memang selalu mengalami proses dinamika, dalam arti Islam terkadang menjadi pengkritik atau berseberangan dengan pemerintah berikut dengan kebijakan-kebijakannya atau terkadang pula menjadi partner pemerintah dalam merumuskan program-program dalam mengatur urusan kenegaraan yang tentunya diharapkan dapat memberi manfaat bagi kemaslahatan rakyat.

Hubungan akomodatif antara Islam dan negara memberikan kemungkinan untuk dipilihnya model perjuangan melalui Islam politik dan sebaliknya sifat hubungan antara Islam dan negara yang konfrontatif memberikan dorongan untuk dipilihnya model perjuangan Islam kultural. Pasang surut Islam politik di Indonesia berkaitan erat dengan dinamika hubungan antara Islam dan negara yang mana hubungan tersebut dalam batas tertentu tercermin dalam Islam politik dalam konteks perkembangan kehidupan politik. Sejarah telah mencatat bahwa perkembangan kehidupan politik di Indonesia, nampaknya ada tempo di mana Umat Islam dalam melakukan perjuangan

untuk kepentingan rakyat mengambil posisi dengan berjuang melalui partai politik, dan pada gilirannya mengantarkan mereka dalam poisisi sebagai penentu kebijakan di negara ini.

Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan Islam di Indonesia memiliki ekspresi yang unik dalam kancah perpolitikan nasional, dalam arti bahwa kalangan Islam ketika terlibat dalam kegiatan politik tidaklah bersifat konstan dan linear. Menjelang kejatuhan pemerintahan Soekarno, kekuatan politik kalangan Islam terpecah antara yang beroposisi dan yang berkolaborasi dalam demokrasi terpimpin namun akhirnya bersatu padu untuk menggulingkan Soekarno dari kekuasaan. Demikian pula dengan era pemerintahan Orde Baru di bawah komando Soeharto, pada dua setengah dasawarsa pertama, kekuatan Islam mayoritas mengambil sikap untuk berkonfrontasi dengan Soeharto, akan tetapi memasuki dekade 1990-an mereka mengambil sikap yang akomodatif, namun pada akhirnya ikut pula menumbangkan rezim orde baru (Aminuddin, 1999: xv-xvi). Tingkat keunikan kekuatan politik Islam menyangkut pula gaya artikulasi politiknya. Pada suatu ketika sangat mengedepankan artikulasi politiknya melalui partai seperti pada saat era Soekarno. Akan tetapi pada era Orde Baru instrumen politik utamanya sempat beralih ke ormas-ormas keagamaan, birokrasi, dan asosiasi cendekiawan muslim. Dan setelah era reformasi datang yang ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Orde Baru, partai-partai yang berasaskan Islam tumbuh kembali bagaikan cendawan di musim hujan (Mujani, 2007: 106).

## PEMBAHASAN

### Ekspresi Kekuatan Politik Islam Pasca Orde Baru.

Menjelang dan sesudah kejatuhan Soeharto dari jabatan kepresidenan terdapat perubahan mendasar menyangkut posisi dan ekspresi kekuatan-kekuatan politik Islam di tanah air. Dua perubahan penting itu antara lain (1) *Mainstream* para pemimpin kekuatan Islam yang memasuki dekade 1990-an menerapkan strategi akomodasi dengan pemerintah kemudian berbalik haluan dengan cara menolak melanjutkan politik akomodasi dengan Presiden Soeharto. Menjelang kejatuhan Soeharto, nampak sekali para pemimpin Islam dari sayap modernis menerapkan kembali strategi oposisi terhadap pemerintah. (2) Seiring dengan datangnya era reformasi kalangan Islam mulai merevitalisasi garis perjuangannya melalui gelanggang politik partisan (Aminuddin, 1999: 362).

Kebangkitan politik Islam Pasca Orde Baru tidak bisa dianggap sederhana. Kebangkitan itu tidak seperti adanya perubahan dari nasionalisme sekuler menjadi Islam yang konservatif. Hal tersebut terlihat ketika ikut terlibatnya mahasiswa

yang beragama Islam dalam proses pelengseran pemerintahan Orde Baru (Hefner 2000: 9). Mereka memandang bahwa Islam merupakan sumber nilai demokrasi dan persamaan. Islam mengajarkan untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai basis struktur dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa (Nugroho, 2017: 36). Dalam pemahaman mereka Islam hadir sebagai pembawa cita-cita untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Namun di lain sisi Negara Orde Baru dianggap belum mampu menghadirkan cita-cita Islam tersebut sehingga sepantasnyalah dilakukan suksesi kepemimpinan nasional.

Segera setelah Soeharto turun dari tampuk kekuasaannya selaku presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, dan berdasarkan amanah konstitusi maka kursi kepresidenan beserta tugas-tugas penyelenggaraan kenegaraan diemban oleh Wakil Presiden yang ada saat itu dijabat oleh Baharuddin Jusuf Habibie. Presiden yang baru ini pun menyadari bahwa pasca terjadinya hiruk pikuk di negara ini, rentan akan terjadinya konflik yang berkepanjangan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menciptakan sebuah kondisi agar negara ini tetap dalam satu kesatuan yang utuh. Secara teoritis pemilihan umum adalah sarana untuk memutuskan dan mengatur konsensus dalam masyarakat demokrasi (Lipset, 2007: 13) sekaligus sebagai proses konsoidasi menuju demokrasi (Maliki, 2018: 128). Terlepas apakah terinspirasi dari pendapat tersebut, salah satu langkah yang ditempuh oleh Presiden Habibie adalah dengan mempercepat pelaksanaan pemilihan umum. Langkah tersebut merupakan bentuk kepekaan pemerintah dalam menampung aspirasi publik yang menghendaki agar terjadi penyegaran hasil-hasil pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1997. Selain itu, adanya desakan dipercepatnya pemilihan umum dari berbagai kalangan, diharapkan agar bangsa Indonesia segera memperoleh kembali kepercayaan dari dunia internasional.

Gayung pun bersambut. Segera setelah disahkannya UU No.2/1999 tentang partai politik, sebagian komponen anak bangsa Indonesia menyambut hal tersebut dengan sukacita, yang kemudian terbukti dan terwujud dalam partisipasi mereka dalam kegiatan politik dengan jalan membentuk dan mendirikan partai politik. Tidak ketinggalan pula elite politik yang berlatar belakang agama Islam. Mereka melihat bahwa potensi umat Islam Indonesia untuk digarap dalam kegiatan politik cukup memadai, maka perlu kiranya dibentuk wadah untuk menyalurkan aspirasi mereka, dan wadah yang paling dianggap tepat dan cukup menjanjikan adalah partai politik. Pada saat itu ada sekitar 141 partai politik yang terdaftar dalam di Departemen

Kehakiman dan HAM (Nurhasim, 2013: 12). Akibat begitu banyaknya partai yang mendaftar maka pemerintah menganggap perlu kiranya agar partai tersebut melalui tahap seleksi, dalam arti partai politik yang benar-benar memenuhi syarat saja yang berhak untuk ikut sebagai kontestan dalam Pemilihan Umum. Dalam mempersiapkan pemilu demokratis pertama pada tahun 1999, pemerintah membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum pada 3 Februari 1999 yang dikenal dengan nama Tim Sebelas. Tugas tim ini adalah memverifikasi pemenuhan syarat administratif partai dalam mengikuti pemilu (Santoso & Supriyanto, 2004: 41).

Meskipun masa persiapannya cukup singkat, namun pemilihan umum dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan oleh pemerintah yakni pada tanggal 7 Juni 1999. Pada pelaksanaan pemilu itu, semua tahapan pemilu berlangsung lancar dan tidak ada kekacauan yang terjadi seperti yang dikhawatirkan oleh sebagian kalangan. Suasana demikian itu bisa terwujud sebagai bentuk adanya kerjasama yang baik antara elemen anak bangsa baik dari kalangan masyarakat umum maupun aparat keamanan. Indonesia berhasil menunjukkan dirinya sebagai negara demokrasi yang tetap mempertahankan nilai-nilainya dengan tetap melembagakan kemampuan untuk membereskan konflik kepentingan dalam sebuah kompetisi (Haryatmoko, 2016: 94). Berdasarkan data yang diperoleh pemilu 1999 menempatkan PDI-P sebagai pemenang utama dengan perolehan suara sebesar 35.689.073 suara atau sekitar 33,74 % dengan perolehan kursi sebanyak 153. Sementara posisi kedua ditempati oleh partai Golkar dengan perolehan suara nasional sejumlah 23.741.758 suara atau sekitar 22,44% dengan perolehan kursi di DPR pusat sebanyak 120 Sementara partai yang mengusung asas Islam ataupun partai yang berasaskan Pancasila namun berbasis massa Islam gagal memperoleh suara dominan di parlemen meskipun ada sebagain yang berhasil masuk 5 besar (Muksin, 2018: 777-788).

Kegagalan partai politik Islam dalam pemilu tentunya tidak terlepas dari begitu banyaknya partai yang mengusung Islam sebagai *platform* politiknya, sehingga meskipun Islam sebagai mayoritas di negeri ini, suaranya terpecah masuk ke beberapa partai. Ditambah lagi dengan jargon yang dikeluarkan oleh Nurcholis Madjid “Islam Yes, Partai Islam No” (Fanani, 2013: 75). Tentunya hal ini memiliki pengaruh signifikan terhadap masyarakat dari segi komunikasi politik. Kegagalan partai politik Islam meraup suara yang signifikan dalam pemilu 1999, tentunya kita diingatkan kembali oleh hasil temuan Clifford Geertz yang menyatakan bahwa masyarakat Jawa terbagi dalam tiga arus utama varian

keagamaan dalam Islam yakni santri, abangan dan priyayi. Meskipun itu merupakan penggambaran dari masyarakat Islam di Jawa tapi boleh dikata Islam di luar Jawa demikian pula adanya dari segi identitas keagamaan mereka. Dalam penemuannya itu, Geertz menggambarkan bahwa perilaku politik umat Islam dari segi penyaluran aspirasi mereka, hanya kalangan santri yang memilih partai Islam sedangkan kalangan abangan dan priyayi menyalurkan aspirasi mereka pada partai yang mengusung asas Pancasila (Geertz 2013) semisal Golkar dan PDI-P.

Pada pemilu 1999, tampilnya PDI-P sebagai pemenang utama, memunculkan keyakinan dari Megawati Soekarno Putri beserta elite partai yang lain untuk memenangkan pemilihan presiden pada sidang umum MPR. Akan tetapi PDI-P bukanlah pemilik mayoritas penuh di MPR sehingga menjalin komunikasi lalu membentuk persekutuan dengan PKB. Akan tetapi persekutuan itu tidaklah bertahan lama dan langsung berubah total ketika Amien Rais menggalang kekuatan bersama dengan partai politik Islam yang tergabung dalam poros tengah (Wahono, 2003: 17). Kelompok poros tengah ini menjagokan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden sebagai tandingan terhadap Megawati dan B.J.Habibie. Puncaknya ketika pada tanggal 7 Oktober 1999, Amien Rais dan tokoh poros tengah yang lain menyatakan secara resmi Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Posisi politik Islam semakin menguat ketika laporan pertanggung jawaban Habibie ditolak yang menyebabkan ia mundur dari bursa calon presiden. Demikian pula yang terjadi pada Yusril Ihza Mahendra, menjelang pemilihan dia menyatakan juga mundur dari calaon presiden. Dengan demikian Partai politik Islam ditambah dengan Golkar berhasil meloloskan Abdurrahman Wahid sebagai presiden dengan meraih 373 suara mengalahkan Megawati Soekarno Putri yang hanya meraih 313 suara (Hermawan 2000).

Nampaknya, proses reformasi telah mengantarkan politik Islam mulai diperhitungkan oleh negara. Meskipun partai-partai Islam tidak mampu meraih suara mayoritas, tetapi koalisi mereka yang tergabung dalam kaukus poros tengah dapat menghalangi tampilnya aliran dan kelompok politikus nasionalis dan koalisinya serta merupakan momentum untuk melahirkan ekspresi Islam masing-masing. Di era reformasi pula mulai didengungkan kembali pada sidang-sidang parlemen agar Piagam Jakarta dicamtumkan kembali pada UUD 1945 sebagai pijakan konstitusi. Mereka yang bersuara lantang untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta adalah PPP, PBB dan Partai Keadilan. Akan tetapi gagasan mereka itu tidak mendapat dukungan dari sesama partai Islam yang pernah tergabung

dalam poros tengah semisal PKB dan PAN, terlebih lagi memang dari partai yang berhaluan nasionalis. Dengan demikian tampilnya politik Islam belum tentu mampu menciptakan sebuah negara dan masyarakat yang berdasarkan ajaran Islam.

**Perjuangan Politik Islam dalam Mewujudkan Civil Society.**

*Civil* society dalam konteks Indonesia ada sebagian kalangan yang menyamakannya dengan masyarakat madani. Perbincangan mengenai masyarakat madani dimulai sejak tahun 1990-an yang terkadang dipersepsikan pula sebagai masyarakat sipil. Gerakan *civil society* seakan-akan melakukan *take over* karena memang negara benar-benar tidak bisa lagi menjadi pelayan rakyat. Salah satu tanda dari gerakan *civil society* adalah munculnya gerakan-gerakan keagamaan, yang menandai adanya kesadaran baru dari orang-orang beragama untuk ambil peran dalam membantu mencarikan alternatif penyelesaian krisis di negara ini. Gerakan ini tidak lagi berpikir sektarian, parokhial dalam beragama (Qodir, 2003: 18-19). Hal ini ditandai dengan banyaknya politisi umat Islam yang mampu menjalin kerjasama dengan pemuka politik yang berbeda agama dalam rangka memberikan solusi terhadap krisis yang dihadapi oleh negeri ini.

Pemikiran politik Islam atau paling tidak mereka yang mengusung nasionalisme religius, cenderung ada penilaian bahwa terjadinya krisis di Indonesia merupakan buah dari kegagalan politik yang berbasis pada nasionalis sekuler. Kaum nasionalisme religius sebagai salah satu kekuatan masyarakat sipil menilai pemerintah telah melakukan malpraktik politik misalnya intoleransi dan korupsi (Hardiman, 2018: 65). Paham nasionalisme sekuler dianggap gagal dalam menjalankan penyelenggaraan negara serta gagal pula menciptakan sebuah masyarakat yang yang makmur baik dari segi ekonomi maupun dari segi spiritual. Dalam pandangan politisi yang berhaluan nasionalis religius, pemerintahan nasionalis sekuler, bukan hanya gagal dari segi politik, tetapi mengalami kegagalan pula dalam bidang sosial Azra (Azra, 2000: 221) . Hal ini terbukti pada akhir keruntuhan Orde Baru yang semakin maraknya aksi kekerasan, kasus kriminal, tingginya perilaku aborsi dan tingkat perceraian yang semakin tinggi. Oleh karena itu patutlah kiranya ketika terjadi upaya penyegaran kepemimpinan nasional yang mampu menghadirkan sebuah masyarakat yang berkualitas pada tingkat kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut memantik kekuatan masyarakat sipil termasuk Muhammaddiyah dan Nahdlatul Ulama untuk berpartisipasi dalam memperbaiki kondisi bangsa (Hilmy, 2017: 110).

Memasuki Era Reformasi, Eep Saefulloh Fatah menilai bahwa partisipasi

politik umat Islam berangkat dari kebingungan terhadap peran dan aksi apa yang harus diambil sehingga terjadi kekeliruan politik kalangan Islam yang sebetulnya bukan sebagai kekeliruan baru tetapi kekeliruan lama yang berulang, akibatnya kalangan Islam tetap gagal dalam politik. Kegagalan itu antara lain (1) Senang membuat kerumunan, tidak rajin menggalang barisan (2) Suka marah, tidak suka melakukan perlawanan (3) Reaktif, bukan proaktif (4) Suka terpesona oleh keaktoran, bukan oleh wacana atau paham yang dimiliki/diproduksi sang aktor (Ahmad, 2004: 125). Terlepas dari penilaian tersebut kalangan Islam tetap berusaha untuk tampil dalam mewarnai proses berjalannya sistem ketatanegaraan demi terwujudnya sebuah masyarakat yang adil dan makmur. Keinginan itu berangkat dari adanya kesadaran dari kalangan politisi Islam bahwa Islam bukan hanya sebagai sebuah komunitas dan warga negara yang berdaulat, akan tetapi ada keinginan lebih untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan sebuah tatanan negara yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kesejahteraan, demokrasi dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam proses tersebut ada beberapa langkah pendekatan yang ditempuh oleh kalangan politisi Islam antara lain pendekatan keterlibatan aktif dalam birokrasi negara dan pemberdayaan masyarakat tapi di luar negara (Hikam, 1999: 47).

Pendekatan keterlibatan aktif ditandai dengan banyaknya kalangan politisi Islam yang ikut bergabung dalam birokrasi penyelenggaraan negara. Mereka memilih terlibat dalam birokrasi dengan harapan agar melalui jalur inilah kesejahteraan rakyat dapat diperjuangkan dan diwujudkan. Pendekatan ini pun berusaha melakukan proses komunikasi antara negara dengan rakyat. Keinginan para politisi Islam ini tentunya disambut baik oleh negara. Affandi mengemukakan bahwa alasan negara berakomodasi dengan Islam. Pertama, karena Islam merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan jikaa hal ini dilakukan akan menimbulkan masalah politik yang cukup rumit. Kedua, di kalangan pemerintahan sendiri terdapat sejumlah figur yang tidak terlalu fobia terhadap Islam, bahkan mempunyai dasar keislaman yang sangat kuat sebagai akibat dari latar belakangnya. Ketiga, adanya perubahan persepsi, sikap, dan orientasi politik di kalangan Islam itu sendiri (Affandi et al., 2018: 63).

Perjuangan politik Islam pada awal reformasi ternyata lebih banyak diperjuangkan oleh Kalangan Islam tradisional atau Islam santri (Basyaib, 1999: 32). Hal tersebut dapat dibuktikan dari komposisi Umat Islam yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama dan Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia sebagai representasi Islam tradisional di Indonesia. Banyak di antara mereka yang merupakan sosok yang ditokohkan dalam lingkungannya baik sebagai ulama ataupun pimpinan pondok pesantren. Hal ini semakin diperkuat bahwa kelompok santri dalam melakukan perjuangan cenderung tidak mengakomodasi kelompok lain, terbukti dengan anggota parlemen dari Partai Kebangkitan Bangsa pada hasil pemilihan umum tahun 1999, tidak seorang pun yang berasal dari luar Agama Islam.

Pendekatan yang kedua adalah mereka yang memilih untuk mengambil posisi di luar negara, dalam arti mereka tidak menjadi bagian dari birokrasi atau pemerintah. Kalangan ini berusaha menciptakan kesejahteraan dengan jalan memberikan pembinaan dan pendidikan pada masyarakat kalangan bawah (rakyat kecil). Perjuangan ini tentunya tetap menjalin kerjasama dengan pemerintah agar tetap bisa memperoleh akses baik dari segi moral ataupun material. Pendekatan ini nampaknya berusaha menjaga keseimbangan antara pemerintah dan rakyat atau dengan istilah mensejajarkan antara pendekatan *top down* dan *botton up*. Hal ini dilakukan dengan perhitungan jangka panjang agar umat Islam tetap diperhitungkan sebagai kekuatan baik di bidang ekonomi, social dan politik yang pada gilirannya mampu mempengaruhi pengambilan keputusan negara.

## KESIMPULAN

Islam politik pasca Orde Baru bisa dikatakan mengalami kebangkitan yang signifikan, terutama secara kuantitatif. Kemunculan partai-partai berbasis Islam seperti PBB, Masyumi Baru, PK (kemudian menjadi PKS) menemani keberadaan PPP yang terlebih dahulu ada. Namun kertebukaan politik Indonesia yang sudah melepaskan idelogi membuat keberadaan partai-partai Islam kehilangan daya jualnya, praktis kini, hanya PKS yang satu-satunya partai Islam yang perolehan suaranya meningkat di setiap pemilu. Sementara PPP yang pada pemilu 2004 meraih suara yang sangat signifikan, pada pemilu 2009 yang lalu mengalami penurunan suara yang sangat drastis. Nasib beberapa partai Islam lain seperti PBB, PBR dan PKNU juga sangat malang dengan gagalnya mereka mencapai *Electoral Threshold* sehingga gagal menempatkan wakilnya di parlemen.

Lahirnya Masa Reformasi ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Soeharto pada taggal 21 Mei 1998, yang disebabkan oleh demonstrasi massa yang sangat besar yang menuntut perubahan dalam segala bidang termasuk bidang kebebasan politik, kebebasan pers serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Presiden Baharuddin Jusuf Habibie yang

menggantikan Soeharto pada masa itu membuka keran demokrasi ini dengan seluas-luasnya yaitu dengan membuka dan menjamin kebebasan pers serta membebaskan berdirinya partai-partai politik yang baru. Era baru ini dsambut dengan gegap gempita dengan tuntutan perubahan-perubahan secara cepat dalam politik.

Kebijakan Presiden B.J.Habibie yang membebaskan berdirinya partai politik itu, disambut dengan lahirnya ratusan partai politik baru di Indonesia yaitu paling tidak 141 partai politik, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan pemilu yang dipercepat pada bulan Juni 1999. Dalam pemilu pertama masa reformasi itu, tidak seluruh partai politik yang terdaftar bisa ikut pemiliu, karena setelah dilakukan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, pemilu tersebut hanya diikuti oleh 48 partai Politik. Pemilu ini, dianggap sebagai pemilu paling demokratis yang dilasanakan oleh bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya setelah Pemilu pertama pada tahun 1955

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Moeslim. 2005. *Islam Yang Memihak*. Yogyakarta: Lkis.

Affandi, A. Rahimin Abdul Rahim, Ramli Mohd Anuar, Siti Maimunah, Muhamad Yusri, Abd Razak Muhd Imran, Hassan Paiz, and ZainalAbidin Mohd Zahirwan Halim. 2018. "Perkaitan Islamophobia Dan Orientalisme Klasik: Satu Analisis." *IDEALOGY* 3(2):62–78.

Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. 2004. *Wajah Baru Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Aminuddin. 1999. *Kekuatan Islam Dan Pergulatan Kekuasaan Di Indonesia: Sebelum Dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arif, Syaiful. 2018. *Islam, Pancasila Dan Deradikalisasi: Menenguhkan Nilai Keindonesiaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Azra, Azyumardi. 2000. *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Bandung: Mizan.

Basyaib, Hamid. 1999. *Mengapa Partai Islam Kalah?: Perjalanan Politik Islam Dari Prapemilu'99 Sampai Pemilihan Presiden*. Ciputat: Pustaka Alvabet.

Fanani, Ahmad Fuad. 2013. "Dilema Partai Politik Islam: Terpuruk Dalam Kegagalan Atau Menjawab Tantangan?" *Maarif: Arus Pemikiran Islam Dan Sosial* 8:72–95.

Farouk, Omar. 1993. "Muslim Asia Tenggara Dari Sejarah Menuju Kebangkitan Islam." in *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.

Geertz, Clifford. 2013. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Hardiman, F. Bud. 2018. *Demokrasi Dan Sentimentalis*. Yogyakarta: Kanisius.

Haryatmoko, Johannes. 2016. *Etika Politik Dan Kekuasaan*. Jakart: Kompas.

Hefner, Robert W. 2000. *Islam Pasar Keadilan: Artikulasi Lokal, Kapitalisme, Dan Demokrasi*. Yogyakarta: LKiS.

Hermawan, Agus. 2000. *Akrobat Politik:*

*Investigasi Jurnalistik Membongkar Skenario Dan Intrik Politik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hikam, Muhammad A. S. 1999. *Demokrasi Dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.

Hilmy, Masdar. 2017. *Jalan Demokrasi Kita: Etika Politik, Rasionalitas, Dan Kesalehan Publik*. Malang: Intrans Publishing.

Karim, Syahrir and Samsu Adabi Mamat. 2013. "Aktivisme Dan Perilaku Politik Islam: Teori, Pemikiran Dan Gerakan." *Jurnal Diskursus Islam* 1(1):127–43.

Lipset, Seymour Martin. 2007. *Political Man: Basis Sosial Tentang Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Majid, Nurcholish. 2007. "Agama Dan Negara Dalam Islam." in *Islam Universal*, edited by N. Madjid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Majid, Nurcholish. 2008. *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.

Maliki, Zainuddin. 2018. *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan Dan Transformasi Politik*. Yogyakarta: UGM PRESS.

Mas'oed, Mochtar. 1998. "Nasionalisme Dan Tantangan Global Masa Kini." in *Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasionalisme*, edited by I. dan A. A. Amal. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mujani, Saiful. 2007. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, Dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Muksin, Ayub. 2018. "Partai Politik Dan Sistim Demokrasi DI Indonesia." *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3(6).

Mutawali, Muhammad. 2015. "Islam Dan Negara (Kedudukan Dan Hubungan Agama/Syari'ah Dan Negara)." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 1(2):110–20.

Noer, Yulfi Alfikri. 2019. "Pemisahan Agama Dan Negara Dalam Bingkai Sistem Politik Di Indonesia." *Sulthan Thaha Journal of Social and Political Studies* 1(01).

Nugroho, Alois A. 2017. *Rakyatisme*. Jakarta: Kompas.

Nurhasim, Moch. 2013. "Kegagalan Modernisasi Partai Politik Di Era Reformasi." *Jurnal Penelitian Politik* 10(1):12.

Nursyamsu, Nursyamsu. 2017. "Perkembangan Politik Islam Kontemporer." *PALAPA* 5(2):167–82.

Qodir, Zuly. 2003. *Islam Liberal: Paradigma Baru Wacana Dan Aksi Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Santoso, Topo and Didik Supriyanto. 2004. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syarif, Zainuddin. 2013. "Masa Depan Politik Islam." *Millah: Jurnal Studi Agama* 13(1):73–90.

Tebba, Sudirman. 2001. *Islam Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Wahono, Untung. 2003. *Peran Politik Poros Tengah Dalam Kancah Perpolitikan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Tarbiatuna.

Zoelva, Hamdan. 2012. "Relasi Islam, Negara, Dan Pancasila Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 4(2).